



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
BADAN LEGISLASI DPR RI
TERKAIT PEMBAHASAN RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH BADAN LEGISLASI
BERSAMA PEMERINTAH DENGAN MELIBATKAN PPUU DPD RI
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Tanggal 8 Februari 2022

Disampaikan oleh:
H. Abdul Wahid, SPdI., MSi.
Wakil Ketua Badan Legislasi, A-4

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua.**

**Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yth. Saudara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;
Yth. Rekan-rekan Anggota Dewan; dan
Hadirin yang kami hormati.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk melaporkan hasil pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang merupakan RUU Usulan DPD RI.

Perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa, Badan Legislasi bertugas melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Menindaklanjuti penugasan dari Badan Musyawarah tersebut, Badan Legislasi telah melaksanakan Rapat Kerja sebagai tahap awal Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM, serta Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI pada tanggal 20 Januari 2022.

Dalam tahap awal Pembicaraan Tingkat I yang sering disebut dengan “pengantar Musyawarah”, mengingat RUU tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan RUU Usulan DPD RI, maka DPD RI dalam hal ini PPUU memberikan penjelasan dan DPR dalam hal ini Badan Legislasi dan Presiden yang diwakili oleh Menteri menyampaikan pandangannya atas RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.

Perlu kami sampaikan bahwa, atas penjelasan dari PPUU DPD RI dari 7 (tujuh) Fraksi yang hadir secara fisik 5 (lima) Fraksi berpandangan agar pembahasan terhadap RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tidak perlu dilanjutkan mengingat Bumdes sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Bumdes. Sedangkan 2 (dua) Fraksi berpandangan agar RUU tentang Bumdes tetap dilanjutkan pembahasan.

Demikian juga pandangan Pemerintah dengan tegas menyatakan agar pembahasan terhadap RUU tentang Bumdes tidak perlu dilanjutkan dan

materi dalam RUU yang belum diatur menjadi bahan penyempurnaan Peraturan Pemerintah tentang Bumdes atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bumdes.

Mengingat masih ada 2 pandangan yang berbeda terhadap RUU tentang Bumdes walaupun sudah ditempuh dengan cara loby setengah kamar, maka Rapat Kerja akhirnya menyetujui/menyepakati agar diberikan waktu selama 1 (satu) minggu untuk memberikan waktu kepada PPUU DPD RI dan Fraksi yang masih menghendaki melanjutkan pembahasan RUU tentang Bumdes untuk mengkomunikasikan di internal masing-masing terkait dengan pembahasan RUU tentang Bumdes.

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Setelah pemberian waktu selama 1 (satu) minggu, akhirnya pada tanggal 27 Januari 2022, Badan Legislasi menyelenggarakan kembali Rapat Kerja bersama Pemerintah serta PPUU DPD RI. Pemerintah dalam hal ini diwakili secara fisik oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Sekjen Kemendagri mewakili Menteri Dalam Negeri, Staf Ahli Menteri Bidang Pengeluaran Negara mewakili Menteri Keuangan, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan mewakili Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan Pandangan Mini Fraksi-fraksi, yaitu F-PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-Demokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP; dan Pemerintah, serta PPUU DPD RI, akhirnya menyetujui/menyepakati:

1. tidak melanjutkan pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa karena sebagian materi muatan dalam RUU sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. materi muatan RUU menjadi bahan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa; dan

3. menyampaikan keputusan Rapat Kerja kepada Rapat Paripurna DPR RI oleh Pimpinan Badan Legislasi DPR RI.

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan Pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa oleh Badan Legislasi, selanjutnya perkenankan kami menyerahkan laporan ini untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi, Pemerintah dalam hal ini Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM, serta Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi, jajaran Sekretariat dan Tim Ahli Badan Legislasi, sehingga keputusan terhadap pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa dapat diselesaikan.

Tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran TV Parlemen dan kalangan wartawan media cetak dan elektronik yang telah meliput dan menyiarkan baik langsung maupun tidak langsung setiap rapat pembahasan RUU ini sehingga bisa diikuti secara langsung oleh masyarakat luas.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 8 Februari 2022
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,

ttd

H. ABDUL WAHID, SPDI., MSI.

A-4